



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 752);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah	Rp. 1.777.682.321.747,00
(2) Belanja Daerah	<u>Rp. 1.757.466.180.219,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 20.216.141.528,00
(3) Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 16.649.533.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 36.865.674.528,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. -20.216.141.528,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.777.682.321.747,00 yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah	Rp. 163.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 10.914.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Rp. 6.629.465.961,00
d. Lain-Lain PAD yang sah	<u>Rp. 45.724.000.000,00</u>

Rp. 226.267.465.961,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebagai berikut :

a. Pendapatan Transfer	
Pemerintah Pusat	Rp. 1.477.163.639.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar	<u>Rp. 50.930.535.080,00</u>
Daerah	Rp. 1.528.094.174.080,00

Pasal 6

Lain-Lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebagai berikut :

Lain-Lain Pendapatan Daerah

yang sah

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Perundang- Undangan	<u>Rp. 23.320.681.706,00</u>
	Rp. 23.320.681.706,00

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.757.466.180.219,00 , yang terdiri atas :

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebagai berikut :

Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai	Rp. 807.861.885.336,80
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 468.062.809.755,20
c. Belanja Bunga	Rp. 3.882.121.000,00
d. Belanja Hibah	Rp. 29.306.028.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 200.000.000,00</u>
	Rp. 1.309.312.844.592,00

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebagai berikut :

Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah	Rp. 5.000.100.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 24.453.397.409,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 28.118.580.000,00
d. Belanja Modal Jalan,	

Jaringan, dan Irigasi	Rp. 65.294.690.118,00
e. Belanja Modal Aset	
Lainnya	<u>Rp. 275.299.000,00</u>
	Rp. 123.142.066.527,00

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebagai berikut :

Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.906.000.000,00
-----------------------	----------------------

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebagai berikut :

Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil	Rp. 17.391.400.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 303.713.869.100,00</u>
	Rp. 321.105.269.100,00

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan ; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.649.533.000,00

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan Rp. 36.865.674.528,00

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan adanya surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah, surplus anggaran pendapatan tersebut dianggarkan untuk pembayaran pokok hutang.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lampiran 1 | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5. Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| 7. Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 8. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas |

9. Lampiran IX

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati Serdang Bedagai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Desember 2024
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



RUSMIANI PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024
NOMOR 60



KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	226.267.465.961,00
4.1.01	Pajak Daerah	163.000.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	405.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	405.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	405.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.235.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.235.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.235.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.720.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.720.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.720.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.800.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	36.192.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	36.192.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	36.192.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	459.800.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	459.800.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	459.800.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	8.500.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	8.500.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	8.500.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.568.300.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.568.300.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.568.300.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	43.512.550.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	43.512.550.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	43.512.550.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.567.350.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	13.567.350.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	13.567.350.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	25.000.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	25.000.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	25.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	25.000.000.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	25.000.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	25.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.914.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.080.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.880.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.880.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.728.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	278.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	6.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	72.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	200.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.300.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.300.000.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	20.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	20.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.100.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.100.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	30.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.106.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.088.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.088.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.629.465.961,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.629.465.961,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.629.465.961,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.629.465.961,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.724.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.100.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.100.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.100.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.124.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.124.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.124.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.950.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.950.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.950.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	3.050.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.950.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.950.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	35.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	35.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	35.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.528.094.174.080,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.477.163.639.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	208.301.736.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	208.301.736.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	208.301.736.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.131.149.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.131.149.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15.131.149.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	55.541.271.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	46.240.115.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	35.116.373.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	11.123.742.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	5.027.083.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	12.184.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	117.026.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.673.364.000,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	59.694.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.164.815.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	4.274.073.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	4.274.073.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	902.854.133.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	758.880.553.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	758.880.553.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	143.973.580.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.969.413.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	86.221.908.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	36.102.473.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	13.479.786.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	295.335.350.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	31.669.497.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	349.970.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	865.499.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	791.800.000,00
4.2.01.09.01.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	3.308.672.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.046.499.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	21.307.057.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	263.665.853.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	125.840.886.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.447.898.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.202.148.000,00
4.2.01.09.02.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	735.724.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	2.633.380.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	82.430.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.066.250.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	5.439.600.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.618.100.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12.425.851.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.154.756.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.930.535.080,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	50.930.535.080,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.930.535.080,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.717.347.046,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	732.482.970,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.480.705.064,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.320.681.706,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.320.681.706,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	23.320.681.706,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	23.320.681.706,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	23.320.681.706,00
	Jumlah Pendapatan	1.777.682.321.747,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.309.312.844.592,00
5.1.01	Belanja Pegawai	807.861.885.336,80
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	501.127.156.927,80
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	379.696.896.976,20
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	246.015.578.191,92
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	133.681.318.784,28
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	36.067.199.149,56
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.820.999.040,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.246.200.109,56
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.011.830.241,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.011.830.241,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.380.677.820,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.983.127.540,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.397.550.280,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.415.795.137,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.403.815.337,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.011.979.800,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.211.296.939,60
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.556.431.956,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.654.864.983,60
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	802.842.559,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	802.842.559,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	695.946.991,96
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.017.157,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	687.929.834,96
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.209.723.287,24
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.362.151.411,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.847.571.876,24
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	931.506.683,08
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	629.137.929,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	302.368.754,08
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.703.441.143,16
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.794.794.576,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	908.646.567,16
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	211.034.879.915,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	206.887.974.165,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	206.887.974.165,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.146.905.750,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	15.187.500,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	196.312.500,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	64.500.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	67.500.000,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	1.357.200.000,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	17.242.500,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	318.750.000,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	58.811.250,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.196.595.125,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	508.775.625,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opse n Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	246.093.750,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opse n Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	98.437.500,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.693.710.994,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.069.784.620,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.069.784.620,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	107.129.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	107.129.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	132.456.180,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	132.456.180,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.638.050,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.638.050,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.014.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.014.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.044.288,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.044.288,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.434.271.056,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	358.009.488,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.068.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.134.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.134.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.110.937.500,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	216.144.880,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	216.144.880,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.380.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.380.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	210.600.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	210.600.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	17.500.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	17.500.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.200.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.200.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	7.925.120,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	7.925.120,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	16.000.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	16.000.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	350.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	350.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	900.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	900.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	610.937.500,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.025.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	26.175.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	8.600.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	9.000.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	180.960.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.299.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	42.500.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	200.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.841.500,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	217.562.750,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	67.836.750,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	32.812.500,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.125.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	72.043.200.000,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	66.425.100.000,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	66.425.100.000,00
5.1.01.89.03	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan	5.618.100.000,00
5.1.01.89.03.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.618.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.062.809.755,20
5.1.02.01	Belanja Barang	138.676.882.143,02
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	128.437.993.962,02
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	34.363.500,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	526.502.573,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.618.839.544,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	14.850.000,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	326.346.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	63.899.109,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	16.625.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.704.689.555,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	112.100.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	210.000.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	900.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.514.000,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.677.933.325,80
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.597.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	59.863.614.511,22
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	277.462.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.278.470.100,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.997.198.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.154.397.629,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	766.015.200,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	98.400.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	273.600.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	107.733.500,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.778.057.280,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	18.759.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.648.310.900,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.271.680.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	340.792.823,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.016.727.662,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.328.355.150,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	385.740.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	727.535.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	258.750.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	199.800.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	220.725.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.200.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	221.000.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	145.800.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	35.460.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	11.700.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	21.600.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	214.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	405.950.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.160.133.181,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	175.249.580,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	6.885.397.101,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	99.486.500,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.078.755.000,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	65.000.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	226.475.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	29.300.000,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	110.500.000,00
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	900.000,00
5.1.02.01.04.0208	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	21.255.000,00
5.1.02.01.04.0293	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	20.128.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	79.800.000,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	335.070.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.787.927.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0571	Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	400.000.000,00
5.1.02.01.04.0740	Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	134.153.940.537,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	102.313.039.085,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.058.610.399,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.606.660.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	55.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	166.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	58.760.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	119.810.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	309.800.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	331.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.243.100.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.049.485.024,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	700.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.978.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	562.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	63.460.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	814.300.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	21.062.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.550.161.297,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.532.745.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	112.800.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	409.200.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	71.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	148.500.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	225.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	345.500.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	426.340.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	113.368.900,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	61.696.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	25.364.215.365,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	259.384.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.705.376.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	19.175.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	30.600.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	661.320.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	280.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	440.247.400,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.202.394.200,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	892.130.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	165.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.150.732.800,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	1.142.568.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.164.800,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.102.817.300,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	346.625.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	40.800.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.378.640.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	141.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	26.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.722.752.300,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	446.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.804.344.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	612.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	100.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	275.700.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	72.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.444.644.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	300.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.754.029.602,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4.138.230.001,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	5.521.799.601,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	794.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	565.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	565.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.112.446.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.352.150.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	760.296.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.351.531.750,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.037.500,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	39.262.500,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	12.900.000,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	13.500.000,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	271.440.000,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.448.500,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	63.750.000,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.762.250,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	761.469.625,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	101.755.125,00
5.1.02.02.13.0020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	49.218.750,00
5.1.02.02.13.0021	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.687.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	88.605.687.410,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	728.679.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	728.679.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.512.999.442,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	84.760.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.238.980.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.158.710.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	814.100.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	90.360.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	476.304.250,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	267.235.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	531.310.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90.341.360,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	245.318.832,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	61.320.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	244.260.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.784.757.617,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	13.421.847.900,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	52.762.909.717,00
5.1.02.03.03.0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	600.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.528.251.351,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	8.082.260.182,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	700.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.349.991.169,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	396.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	51.000.000,00
5.1.02.03.06.0002	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	51.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.038.144.065,18
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.538.144.065,18
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.800.520.565,18
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.737.623.500,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	500.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	500.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.251.905.600,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.591.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.439.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	12.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.140.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.660.905.600,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	103.488.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	19.557.417.600,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	3.336.250.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	3.066.250.000,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	3.066.250.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	135.000.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	135.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	135.000.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.000.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.000.000.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.882.121.000,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.882.121.000,00
5.1.03.04.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	3.882.121.000,00
5.1.03.04.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	3.882.121.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	29.306.028.500,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.860.928.500,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.860.928.500,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.860.928.500,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	16.112.900.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	16.112.900.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	16.112.900.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	5.332.200.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.332.200.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.332.200.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	200.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	200.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	200.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	123.142.066.527,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.000.100.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.000.100.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	5.000.100.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	5.000.100.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.453.397.409,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.919.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.919.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	860.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.059.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	16.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	16.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.135.795.094,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.563.949.040,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.563.949.040,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.537.446.054,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.944.646.054,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	487.060.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	5.600.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.200.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	74.940.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	34.400.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	34.400.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	61.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	61.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	61.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.083.354.535,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.970.394.151,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.970.394.151,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	112.960.384,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	112.960.384,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	129.500.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	129.500.000,00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	129.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.308.747.780,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.292.354.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	5.559.100.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	733.254.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.016.393.780,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	184.380.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	167.474.280,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	664.539.500,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	800.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	800.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	800.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.118.580.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	27.918.580.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.918.580.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	21.850.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	5.148.080.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	350.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	570.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.294.690.118,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	43.598.856.400,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	36.008.815.400,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	28.350.742.400,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	7.658.073.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.590.041.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	7.590.041.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	21.294.773.718,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	16.211.962.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	16.211.962.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.082.811.718,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	3.444.529.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.638.282.718,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	401.060.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	401.060.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	401.060.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	275.299.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	275.299.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	275.299.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	275.299.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.906.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.906.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.906.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.906.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.906.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	321.105.269.100,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.391.400.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	17.391.400.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.391.400.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.391.400.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	303.713.869.100,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	303.713.869.100,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	303.713.869.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	208.301.736.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	95.412.133.100,00
	Jumlah Belanja	1.757.466.180.219,00
	Total Surplus/(Defisit)	20.216.141.528,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.649.533.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16.649.533.000,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.649.533.000,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	16.649.533.000,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	16.649.533.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.865.674.528,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.865.674.528,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	36.865.674.528,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	36.865.674.528,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	36.865.674.528,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.865.674.528,00
	Pembiayaan Netto	-20.216.141.528,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Bupati Serdang Bedagai,

Darma Wijaya